

ANALISIS KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) DALAM EVALUASI PENDIDIKAN

Achmad Rasyid Ridha¹, Yusi Tri Hastuti², Sri Haryati³

^{1,2,3}Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

*Corresponding Email : ahmadrosyeed@gmail.com

ABSTRAK

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. KKM berfungsi sebagai acuan untuk menentukan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dan membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan KKM dalam praktik pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuannya, serta implikasinya terhadap proses evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa KKM sering kali ditentukan tanpa mempertimbangkan secara optimal aspek kompleksitas materi, daya dukung sekolah, dan karakteristik peserta didik. Selain itu, penerapan KKM yang kurang tepat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil evaluasi dan kemampuan riil siswa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan kolaborasi antarpihak dalam penetapan dan implementasi KKM agar evaluasi pembelajaran dapat berlangsung secara objektif dan efektif dalam mendorong pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kriteria Ketuntasan Minimal, evaluasi pendidikan, kualitas pendidikan.

ABSTRACT

The establishment of Minimum Competency Criteria (KKM) is one of the essential elements in the educational evaluation system in Indonesia. KKM serves as a reference for determining the level of students' competency achievement and helps teachers identify further learning needs. This study aims to analyze the implementation of KKM in learning practices, the factors influencing its determination, and its implications for the evaluation process and the improvement of education quality. The method used in this study is descriptive qualitative, with data collected through interviews, documentation, and literature review. The analysis results indicate that KKM is often determined without optimal consideration of the complexity of the material, school support capacity, and the characteristics of the students. Furthermore, improper implementation of KKM may lead to discrepancies between evaluation results and students' actual abilities. Therefore, a comprehensive understanding and collaboration among stakeholders are necessary in the establishment and implementation of KKM so that the learning evaluation can be conducted objectively and effectively to support the holistic achievement of student competencies.

Keywords: Minimum Competency Criteria, educational evaluation, education quality.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Di Indonesia, penerapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, penerapan KKM dalam Kurikulum Merdeka menghadirkan tantangan tersendiri terutama dalam menyelaraskan standar evaluasi dengan prinsip fleksibilitas dan individualitas yang diusung kurikulum ini (Dewi Putri Batubara, 2023).

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan batas nilai minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran agar dinyatakan tuntas dalam mengikuti proses pembelajaran. Penetapan KKM menjadi salah satu komponen penting dalam sistem evaluasi pendidikan, karena berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pentingnya analisis terhadap KKM didasari oleh kebutuhan akan sistem evaluasi yang objektif, transparan, dan mampu memberikan gambaran akurat mengenai tingkat keberhasilan pembelajaran.

Penetapan KKM dilakukan melalui analisis mendalam yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa KKM yang ditetapkan relevan dan realistis, serta dapat memotivasi siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan adanya KKM, guru dapat merancang program remedial bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan dan program pengayaan bagi mereka yang telah melampaui standar (Tatik Sudiati, 2018).

Dalam praktiknya, banyak satuan pendidikan yang menetapkan KKM secara kurang tepat, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan seperti kompleksitas materi, kemampuan rata-rata siswa, serta sumber daya pendukung yang tersedia. Kesalahan dalam penetapan KKM dapat berdampak pada penilaian hasil belajar yang tidak proporsional. KKM yang terlalu tinggi dapat menyebabkan banyak siswa dianggap tidak tuntas meskipun telah menunjukkan kemampuan yang memadai, sementara KKM yang terlalu rendah dapat menurunkan standar mutu pendidikan dan menyedihkan evaluasi capaian pembelajaran.

Namun, penerapan KKM juga menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perubahan kurikulum yang terus berlangsung. Dalam Kurikulum Merdeka, misalnya, KKM telah mengalami penyesuaian dengan penekanan pada penilaian formatif dan pendekatan yang lebih fleksibel dalam mengevaluasi pencapaian siswa (Muhajir & Muslimah, 2021). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kritis terhadap pelaksanaan KKM dalam evaluasi pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Dengan analisis KKM yang tepat, diharapkan proses evaluasi pendidikan tidak hanya menjadi alat ukur hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana pengembangan kualitas pembelajaran yang lebih baik.

Dalam hal ini, akan dibahas secara mendalam mengenai analisis KKM dalam evaluasi pendidikan, termasuk proses penetapan, implementasi, tantangan yang dihadapi,

serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas KKM dalam konteks pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui Buku dan artikel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Artikel ini menggunakan analisis isi sebagai metode analisisnya. Penelitian ini dilaksanakan untuk menggambarkan dan menjelaskan analisis kriteria ketuntasan minimal dalam evaluasi pendidikan. Untuk tujuan penulisan artikel, langkah pertama adalah mengidentifikasi berbagai sumber terkait. Kedua alat analisis konten untuk mengidentifikasi kesamaan di antara berbagai sumber ini. Ketiga, menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

KKM merupakan singkatan dari Kriteria Ketuntasan Minimal, yakni kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Penentuan KKM ini dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. Sedangkan menurut Prayitno dalam bukunya yang berjudul *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan* menjelaskan bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah acuan untuk menetapkan seseorang peserta didik secara minimal memenuhi persyaratan penguasaan atas materi pelajaran tertentu.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) harus ditetapkan oleh satuan pendidikan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapa pun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva. Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal (Desi Linda Putri, 2023).

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap. Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Pada

laporan hasil belajar seperti rapor siswa, harus dicantumkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada setiap mata pelajarannya. Hal ini berguna sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik (Djemari Mardapi, dkk. (2015).

B. Fungsi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Berikut ini adalah fungsi dari ditetapkan kriteria ketuntasan minimal:

1. Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan. Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial atau layanan pengayaan.
2. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Setiap kompetensi dasar (KD) dan indikator ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM. Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui KD-KD yang belum tuntas dan perlu perbaikan.
3. Digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolok ukur. Oleh karena itu hasil pencapaian KD berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang peta KD-KD tiap mata pelajaran yang mudah atau sulit, dan cara perbaikan dalam proses pembelajaran maupun pemenuhan sarana prasarana belajar di sekolah.
4. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Pendidik melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain pendidik. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah.
5. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat.

C. Prinsip Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut (Ratna Pangastuti):

1. Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui professional judgement oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan
2. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas dan daya dukung peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi.
3. Kriteria ketuntasan minimal setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam Kompetensi Dasar tersebut. Peserta didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk KD tertentu apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada KD tersebut.
4. Kriteria ketuntasan minimal setiap Standar Kompetensi (SK) merupakan rata-rata KKM Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam SK tersebut.
5. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran, dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB/Rapor) peserta didik.
6. Indikator merupakan acuan/rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik Ulangan Harian (UH), Ulangan Tengah Semester (UTS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS). Soal ulangan ataupun tugas-tugas harus mampu mencerminkan/menampilkan pencapaian indikator yang diujikan. Dengan demikian pendidik tidak perlu melakukan pembobotan seluruh hasil ulangan, karena semuanya memiliki hasil yang setara.
7. Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal.

D. Langkah Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Dalam menetapkan KKM terdapat beberapa tahap yang seharusnya dilalui. Adapun tahapan penetapan KKM antara lain (Muhammad Yusuf Hidayat, 2020) :

1. Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan *intake* peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KKM kompetensi dasar hingga KKM mata pelajaran.
2. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. KKM dicantumkan dalam laporan

hasil belajar atau rapor pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik.

Adapun Langkah – langkah dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) secara real yaitu:

- a. Hitunglah jumlah Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran setiap kelas.
- b. Tentukan kekuatan/nilai untuk setiap aspek/komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek.
- c. Aspek kompleksitas. Semakin kompleks (sukar) KD maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi.
- d. Aspek sumber daya pendukung (sarana). Semakin tinggi sumber daya pendukung maka nilainya semakin tinggi.
- e. Aspek intake. Semakin tinggi kemampuan awal siswa (intake) maka nilainya semakin tinggi pula.
- f. Jumlah nilai setiap komponen, selanjutnya dibagi tiga untuk menentukan KKM setiap KD.
- g. Jumlahkan seluruh KKM KD, selanjutnya dibagi dengan jumlah KD untuk menentukan KKM mata pelajaran
- h. KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa.

E. Tantangan Penerapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Penerapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah heterogenitas kemampuan siswa. Di sekolah, siswa berasal dari latar belakang yang beragam, baik dalam hal kemampuan akademik maupun sosial-ekonomi. Hal ini menyulitkan guru untuk menetapkan KKM yang dapat diterapkan secara adil bagi semua siswa. Guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu menjembatani perbedaan ini, namun sering kali keterbatasan waktu dan sumber daya di madrasah membuat hal ini menjadi sulit untuk direalisasikan. Dalam konteks ini, penyesuaian KKM menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan yang lebih individual dan fleksibel (Musiyati, H. J, 2019).

Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki madrasah. Banyak madrasah, terutama yang berada di daerah terpencil, tidak memiliki fasilitas yang memadai, termasuk buku ajar, teknologi pendidikan, dan pelatihan untuk guru. Keterbatasan ini sering kali mengakibatkan KKM yang ditetapkan menjadi tidak realistis dan tidak dapat dicapai oleh siswa. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman yang mendalam tentang penerapan KKM dalam konteks Kurikulum Merdeka dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan dan apa yang dievaluasi, sehingga menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang optimal.

Di samping itu, kesulitan dalam sosialisasi dan pemahaman KKM di kalangan siswa, orang tua, dan masyarakat juga menjadi tantangan penting. Banyak pihak yang masih menganggap KKM sebagai sekadar batas nilai kelulusan, tanpa memahami bahwa KKM seharusnya mencerminkan penguasaan kompetensi yang lebih holistik.

Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan tekanan yang tidak perlu baik bagi siswa maupun guru. Madrasah perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya ini agar penerapan KKM dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan.

F. Solusi Mengoptimalkan Penerapan KKM

Untuk mengoptimalkan penerapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam Kurikulum Merdeka, pertama-tama, penting bagi madrasah untuk melakukan pelatihan intensif bagi guru. Pelatihan ini harus berfokus pada pemahaman konsep KKM yang lebih mendalam serta keterampilan dalam merancang penilaian yang beragam dan inklusif. Guru perlu dibekali dengan strategi pembelajaran yang fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan KKM dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Dengan pelatihan yang memadai, diharapkan guru dapat lebih percaya diri dalam mengimplementasikan KKM dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan semua siswa, terlepas dari latar belakang dan kemampuan mereka. Selanjutnya, madrasah harus meningkatkan infrastruktur dan sumber daya pendukung yang diperlukan untuk mencapai KKM yang realistis. Ini termasuk penyediaan buku ajar, alat peraga, dan teknologi pembelajaran yang memadai. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan bahwa semua madrasah, terutama yang berada di daerah terpencil, memiliki akses terhadap sumber daya ini. Selain itu, madrasah juga dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat dan lembaga swasta untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas, baik dalam bentuk dana maupun fasilitas. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, guru dapat lebih leluasa dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan KKM yang ditetapkan (Muhtar Hidayat, 2025).

Terakhir, sosialisasi dan komunikasi yang efektif mengenai KKM kepada siswa, orang tua, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Madrasah dapat mengadakan seminar, workshop, atau diskusi kelompok untuk menjelaskan tujuan dan fungsi KKM secara menyeluruh. Penjelasan yang jelas akan membantu mengurangi kesalahpahaman yang sering terjadi, sehingga semua pihak dapat berperan aktif dalam mendukung pencapaian KKM siswa. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KKM sebagai alat evaluasi yang holistik, diharapkan akan tercipta suasana yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan karakter siswa. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penerapan KKM, tetapi juga akan memperkuat kolaborasi antara madrasah dan komunitas dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

KESIMPULAN

Analisis KKM dalam evaluasi pendidikan menunjukkan bahwa KKM bukanlah sekedar angka statistik, tetapi representasi tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Melalui analisis yang mendalam atas tiga aspek penting-kompleksitas kompetensi dasar, karakteristik siswa, dan daya dukung sekolah-penetapan KKM dapat memastikan keberhasilan proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah acuan untuk menetapkan seseorang peserta didik secara minimal memenuhi persyaratan penguasaan atas materi pelajaran tertentu. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) harus ditetapkan oleh satuan pendidikan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Salah satu fungsi dari KKM adalah sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan.

Penerapan KKM dalam Kurikulum Merdeka menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, keberagaman kemampuan siswa, dan kurangnya pemahaman konsep KKM yang fleksibel. Meski demikian, KKM tetap penting untuk memastikan pencapaian kompetensi siswa secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Diperlukan pelatihan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang KKM, dukungan infrastruktur yang memadai, dan pendekatan pembelajaran yang fleksibel sesuai kebutuhan siswa. Selain itu, sosialisasi kepada semua pihak serta evaluasi berkala penerapan KKM harus dilakukan agar lebih relevan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Dewi Putri. (2023). *"Kontruksi Penilaian Standart KKM Dalam Pencapaian Sikap Siswa di SMA Gajah Mada Medan"*. Universitas Negeri Medan. Vol. 7, No. 3. Hal. 91-92
- Hidayat, Muhammad Yusuf. (2020). *"Analisis Penentuan Standar Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Mata Pelajaran Fisika Kelas XI SMAN 17 Makassar"*. Jurnal Pendidikan Fisika. Vol.8, No. 1, Hal. 282-284
- Hidayat, Muhtar. (2025). *"Penerapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Dalam Kurikulum Merdeka : Tantangan Dan Solusi Madrasah. At-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam"*. Vol.3, No. 1. Hal. 199.
- Mardapi, Djemari. dkk. (2015). *"Menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal Berbasis Peserta Didik. Jurnal Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan"*. Vol. 19, No. 1. Hal 39-40
- Muhajir. (2021). *"Menentukan kriteria ketuntasan minimum (KKM)"*. (527-536). Palangka Raya: Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies.
- Musiyati. (2019). *"Optimalisasi penggunaan media gambar dalam peningkatan pencapaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) bahasa Indonesia siswa kelas I SDN 20 Cakranegara. Ganec Swara"*. Vol. 13, No. 1, Hal. 193.
<https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.81>
- Putri, Desi Linda. (2025). *"Analisis KKM Dalam Evaluasi Pendidikan. Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner"*. Vol. 9, No. 1. Hal. 280-284
- Pangastuti, Ratna. *"Penilaian Acuan Norma, Penilaian Acuan Patokan, Kriteria Ketuntasan Minimal Di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Plus Junwangi Krian Sidoarjo Jawa Timur"*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sudiati, Tatik. (2018). *"Peningkatan Kinerja Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal Melalui Workshop"*. Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan. Vol. 3, No. 2. Hal. 230-233